



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA,  
EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pariwisata RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 21 Juli 2016.
Pukul	: 17.25 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Tuti Retnowati, BSc./Kasubag. Rapat Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan K/L Tahun 2017 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.</b>
Hadir	: 32 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pariwisata beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 17.25 oleh Ferdiansyah S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**A. Penyempurnaan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Kegiatan K/L**

1. Terhadap usul pagu indikatif RAPBN TA 2017 Kemenpar RI tidak mengalami perubahan yaitu sebesar **Rp4.087.624.782.000,- (empat triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**, yang didalamnya terdapat anggaran fungsi pendidikan sebesar **Rp664.000.000.000,- (enam ratus enam puluh empat miliar rupiah)**, Komisi X DPR RI **belum menyetujui** untuk pagu maupun alokasi anggaran di masing-masing deputi dan program karena masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
2. Kemenpar RI menyampaikan skenario penganggaran tahun 2017 sbb:
  - a. Skenario ideal (Skenario A) : Rp8.000.000.000.000,-
  - b. Skenario B/C/D/E (\*) : Rp4.087.624.782.000,-

(*) Skenario B : Skenario pendidikan Skenario C : Skenario proporsional Skenario D : Skenario devisa Skenario E : Skenario SE Kemenkeu	Secara total jumlah pagu sama tetapi rincian di masing-masing Deputi berbeda
---	--

3. Dalam rangka pembuatan Nota Keuangan RAPBN TA 2017, untuk sementara Komisi X DPR RI memberikan pandangan guna dijadikan bahan rujukan diantaranya yaitu:
  - a. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk program prioritas antara lain pembangunan daerah/wilayah penyangga 10 destinasi baru, dan sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah cq. Kemenpar RI dengan Pemerintah Daerah.
  - b. Mendorong Kemenpar RI agar melakukan penguatan program untuk peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata yang berdaya saing di dalam dan di luar negeri, peningkatan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, peningkatan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.
  - c. Mendorong Kemenpar RI untuk gencar mempromosikan pariwisata Indonesia dan memanfaatkan peluang adanya kegiatan Internasional yang berlangsung di Indonesia seperti penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
  - d. Mendesak Kemenpar RI untuk lebih pro aktif melakukan pembahasan program-program prioritas dan kebutuhan anggaran dengan Kemenkeu RI dan Bappenas RI agar pagu definitif APBN TA 2017 sekurang-kurangnya sama dengan APBN TA 2016 yaitu sebesar Rp5,409T.
4. Komisi X DPR RI dan Menpar RI sepakat akan mengadakan Raker kembali setelah Presiden RI menyampaikan Nota Keuangan RAPBN TA 2017 dengan agenda pendalaman terhadap penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka A.3.

#### B. Lain-lain

1. Terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi destinasi pariwisata, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpar RI untuk berkoodinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengimplementasi amanat Pasal 97 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya.
2. Mendesak Kemenpar RI untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan wisman dan wisnus.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.05 WIB

MENTERI PARIWISATA RI,



ARIEF YAHYA

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M